

Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Ida Bagus Odi Rezky Saputra¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia
Email: idabagus.odie@gmail.com

Ni Made Dwi Ratnadi²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini berupa pengamatan pada PT Bank Pembangunan Bali yang sudah menerapkan *Good Corporate Governance*. Metode pengumpulan data menggunakan data studi dokumentasi dan studi pustaka. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang lebih jelas guna memecahkan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan meliputi analisis kinerja keuangan berbasis rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan setelah penerapan *Good Corporate Governance* jika dilihat menggunakan *Return on Asset*, *Beban Operasional/Pendapatan Operasional*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Loans*. Sedangkan jika dilihat melalui rasio *Loan to Deposit* dan *Return on Equity* penelitian menemukan adanya penurunan kinerja setelah penerapan *Good Corporate Governance*.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*; Kinerja Keuangan; Bank.

Financial Performance Before and After the Implementation of Good Corporate Governance in PT. Bali Regional Development Bank

ABSTRACT

This research is in the form of observations on PT Bank Pembangunan Bali which has implemented *Good Corporate Governance*. The data collection method uses documentation study data and literature study. This is intended to obtain a clearer picture in order to solve the problem under study. Analysis of the data used includes an analysis of financial performance based on liquidity ratios, profitability and solvency. The results of this study indicate an increase in financial performance after the implementation of *Good Corporate Governance* when viewed using *Return on Assets*, *Operating Expenses / Operating Income*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Loans*. Meanwhile, if viewed through the ratio of *Loan to Deposit* and *Return on Equity* the study found a decrease in performance after the implementation of *Good Corporate Governance*.

Keywords: *Good Corporate Governance*; Financial Performance; Bank.

The Article is Available in : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 7
Denpasar, Juli 2020
Hal. 1750-1766

Artikel Masuk:
10 September 2020

Tanggal Diterima:
24 Juni 2020

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam suatu negara. Peranan penting bank dalam perekonomian suatu negara yaitu sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam penyaluran dana masyarakat dalam kegiatan investasi dan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, selain kedua fungsi tersebut bank juga berfungsi sebagai pentransmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank central (Saragih, 2013).

Krisis ekonomi tahun 1997/1998, membuka borok praktik buruk perbankan yang terjadi akibat liberalisasi perbankan yang tidak disertai dengan system pengawasan dan rambu – rambu tata kelola yang baik (Krugman, 1998). Di Indonesia, penerbitan Pakto 88 yang semula ditujukan untuk percepatan pertumbuhan perekonomian, justru berbalik membuat tumbuh pesatnya bank – bank dengan modal rendah, bankir dengan pengalaman minim yang menyebabkan tata kelola dan pengawasan buruk. Hal tersebut diindikasikan sebagai faktor utama memburuknya kondisi perbankan nasional pada krisis ekonomi, yang ditunjukkan melalui meningkatnya kredit macet dan pembukuan atas kinerja negatif pada banyak bank di Indonesia.

Setelah krisis ekonomi tahun 1997/1998, terjadi kasus Bank Century, yang merupakan kasus nyata kegagalan bank yang berdampak sistemik, yang meluluhlantakan perekonomian Indonesia di tahun 2007. Dengan adanya risiko sistemik yang melekat pada bisnis perbankan, maka dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta nilai – nilai etika (*code of conduct*) pada bisnis perbankan, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Perbankan (OJK) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, dan ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP.

GCG merupakan konsep yang diajukan dalam rangka peningkatan kinerja perbankan melalui supervisi dan monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan, sehingga menghasilkan pengelolaan bank secara lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Moeljadi & Zamani, 2012). Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditur sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar, *corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkelanjutan di sektor korporat.

Keberhasilan penerapan *good governance* dalam suatu perusahaan dapat dilihat melalui pelaporan keuangan yang mencerminkan prestasi kinerja perusahaan. Untuk melihat keberhasilan penerapan GCG pada perbankan dapat dilihat dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan bank mencerminkan kemampuan operasional bank baik dalam bidang penyaluran dana, penghimpunan dana dan teknologi serta sumber

daya manusia, dengan demikian perbankan dituntut agar mampu tumbuh dan memiliki daya saing. Untuk mengetahui kinerja suatu bank perlu dilakukan suatu pengukuran atau penilaian. Fungsi dari penilaian atau pengukuran kinerja adalah sebagai alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, juga memperlihatkan kepada investor atau nasabah maupun pihak yang berkepentingan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas baik.

Dalam menilai kinerja keuangan, investor atau nasabah maupun pihak yang berkepentingan biasanya memacu pada laporan keuangan. Kondisi suatu bank yang baik atau jauh dari kebangkrutan maupun kondisi bank yang kurang baik atau tidak stabil dapat diketahui dari hasil analisis data bank yang dalam hal ini adalah kondisi manajemen dan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Informasi tentang posisi keuangan bank, kinerja bank, aliran kas bank, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan. Untuk memahami informasi tentang laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Analisis laporan keuangan ini nantinya dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan.

Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, serta rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dalam menilai kinerja suatu bank antara lain *Cash Ratio*, *Reserve Requirement*, *Loan to Deposit Ratio*, *Loan to Asset Ratio*. Rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Rasio rentabilitas terdiri dari, *Return on Asset*, *Return on Equity*, *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional*, *Net Profit Margin Ratio*. Dan rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dimana rasio solvabilitas dalam pengukuran kinerja keuangan suatu bank terdiri dari, *Capital Adequacy Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Asset Ratio*.

Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam melindungi kepentingan masyarakat menjadikan sektor perbankan sebagai sector yang "highly regulated". Untuk itu setiap bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali adalah salah satu bank yang turut mendukung sektor ekonomi nasional pada umumnya dan Bali pada khususnya.

PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pelaksanakan GCG sesuai PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, maka PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali (dalam hal ini Dewan Pengawas) telah membentuk komite-komite yakni Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite

Pemantau Risiko. Selain itu, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali juga telah menerbitkan Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2007 yang dapat diakses pada situs bank sebagai wujud pemenuhan prinsip transparansi.

Selain itu, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali juga diberi kepercayaan untuk mengelola dana-dana milik Pemerintah Daerah Bali, seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. PT. PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali merupakan salah satu bank yang sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, hal ini terbukti dengan berlakunya prinsip *Good Corporate Governance* dipertegas dengan diperolehnya Nilai Komposit Hasil Akhir *Self-Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali untuk posisi Juni 2018 di peringkat 2 dengan Predikat Komposit "Cukup Baik" (Bank BPD Bali, 2015).

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja keuangan pada umumnya. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja keuangan merupakan pondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.

Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholder bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Kinerja perbankan sendiri sering dinilai terkait dengan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 yang mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dan perbuatan dalam situasi tertentu, dimana setiap sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan (Riani, 2014). Wibowo, (2004) menjelaskan bahwa kinerja berasal dari pengertian *peformance*. Adapun pengertian *peformance* sebagai hasil kerja baik yang berupa potensi kerja atau bahkan kegiatan yang membawa dampak buruk bagi perusahaan. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, tidak hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja keuangan

secara umum dan keunggulan kompetitif merupakan suatu ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil. Pengukuran terhadap pengembalian investasi, pertumbuhan, volume, laba dan tenaga kerja pada perusahaan umum dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan (Jeaning & Beaver, 1997).

Kinerja merujuk pada konsep keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly *et al.*, 1994). Kinerja keuangan merupakan suatu tampilan perusahaan dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi ataupun karyawan berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan (Mulyadi, 2001). Kinerja sendiri terbagi menjadi kinerja finansial (keuangan) dan kinerja non-finansial. Kinerja keuangan perusahaan diartikan sebagai hasil dari usaha perusahaan yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.

Terdapat beberapa kriteria dalam evaluasi suatu kinerja keuangan yang disampaikan dalam berbagai literatur. Kriteria tersebut meliputi kinerja *financial* maupun *non-financial*. Kriteria-kriteria yang berbeda dalam mengukur kinerja keuangan tersebut sebenarnya bergantung pada pengukuran kinerja itu sendiri. Tolok ukur bersifat unik, karena adanya kekhususan pada setiap badan usaha, antara lain bidang usaha, latar belakang, status hukum, tingkat permodalan, tingkat pertumbuhan dan tingkat teknologi. Perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku badan usaha, dan dengan sendirinya juga berpengaruh terhadap kinerja dan tolok ukur yang digunakan (Triwinasis, 2013).

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja keuangan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. *Disclosure* laporan keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. *Disclosure* sebagai salah satu aspek *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja keuangan. Kinerja keuangan tersebut diukur dengan alat analisis Tobin's Q sebagai ukuran kinerja pasar (Sam'ani, 2008). *Return on equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam memberikan return atas modal yang investor tanamkan (Horne, *et al.*, 2005).

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan atau kinerja keuangan (Rosyid, 2015). Analisis perbandingan (*ratio analysis*) merupakan suatu teknik atau peralatan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja sebuah organisasi perusahaan (Darmawi, 2011). Menurut Kasmir, (2008), rasio keuangan merupakan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan dengan melakukan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan dengan melakukan perbandingan antar komponennya sehingga menjadi angka dalam satu periode atau beberapa periode.

Analisis rasio dapat digunakan sebagai perbandingan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan akan datang dalam perusahaan yang sama. Jika rasio keuangan diurutkan dalam beberapa periode tahun analisis dapat mempelajari komposisi perubahan dan menentukan apakah ada perbaikan atau penurunan dalam kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio-rasio keuangan perbankan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan perbankan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Undang - Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Allen & Elena, (2007) menyatakan bahwa, "*the banking sector is one of the most highly regulated sectors in the economy*". Ini dikarenakan aktivitas masyarakat dan dunia usaha saat ini banyak ditunjang oleh sektor perbankan yang ada, Jasa Perbankan menurut Sulaiman & Zakaria, (2010), pada umumnya terbagi atas dua tujuan, *Pertama*, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk itu, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini merupakan peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter atau saling mempertukarkan barang dengan barang yang lainya; *Kedua*, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan dapat meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman bagi modal membangun usaha.

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun perusahaan tertutup harus memandang *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Darmawati, *et al.*, 2004).

Corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Sam'ani, 2008). *Corporate governance* adalah suatu gabungan antara hukum, peraturan dan praktek-praktek sektor privat yang cocok yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal, sumber daya manusia dan beroperasi secara efisien, sehingga dapat menjaga kelangsungan operasional dengan menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang untuk pemegang sahamnya dan masyarakat secara keseluruhan (*Organization for Economic Cooperation and Development / OEC*)

Corporate governance telah menjadi salah satu bahasan penting yang menarik sejak krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Penyebab terjadinya krisis keuangan adalah lemahnya penerapan *corporate governance*, salah satu cirinya adalah tindakan para manajer perusahaan yang mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan investor, sehingga akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah ditanamkan (Anggitarani, 2009).

Keberhasilan dari praktik *corporate governance* perusahaan publik tidak terlepas dari adanya sebuah peraturan. Ada tiga tantangan fundamental yang saat ini dihadapi oleh pembuat peraturan publik (Anggitarani, 2009) ; *Pertama* adalah siapa yang seharusnya membuat peraturan, pemerintah atau *self-regulation* misalnya BEI; *Kedua* adalah bagaimana mengaturnya. Pembuat peraturan menghadapi dua pilihan yaitu membuat prinsip atau peraturan *corporate governance*; *Ketiga* adalah bagaimana caranya agar prinsip atau peraturan tersebut dilaksanakan.

Organization for Economic Cooperation and Development/OECD telah mengeluarkan seperangkat prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan seuniversal mungkin. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan namun tetap harus disesuaikan dengan sistem hukum, aturan atau nilai yang berlaku di negara masing-masing.

Penerapan *Good Corporate Governance* Bank di luar 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu bank atau perselisihan internal Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target di akhir tahun, dimana penetapan target tersebut sangat tinggi (*ambisius*) sehingga mengakibatkan dilakukannya praktek-praktek yang tidak sehat oleh manajemen ataupun pegawai bank dalam pencapaiannya.

Pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan *Good Corporate Governance* agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yaitu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor *Good Corporate Governance*. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR) merupakan pengganti dari penilaian terhadap faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan CAMELS rating, dimana penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Bank wajib melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank, *check and balance*, serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi pihak independen.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Bank wajib secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sehingga Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang berhubung dengan penulisan skripsi, penulis melakukan penelitian pada PT Bank Pembangunan Bali, yang bertempat Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon - Denpasar. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan *Good Corporate Governance* dalam kegiatan bisnisnya sesuai. Fokus penelitian adalah dampak penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja laporan keuangan. Penelitian ini melihat seberapa besar perubahan yang terjadi sebelum penerapan dan setelah penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja laporan keuangan.

Data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data diatas, merupakan data mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang lebih jelas guna memecahkan masalah yang diteliti, sehingga memudahkan penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan, dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2011).

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dimana akan dipaparkan kinerja keuangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebelum dan sesudah penerapan *good coporate governance*.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Analisis kinerja keuangan berbasis rasio likuiditas:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

Analisis kinerja keuangan berbasis rasio rentabilitas

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Ekuitas}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Analisis kinerja keuangan berbasis rasio solvabilitas.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang Diberikan}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bank melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15 /15/DPNP tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sehingga apabila masih terdapat kekurangan - kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan - tindakan korektif yang diperlukan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memandang bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan performa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepercayaan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan stakeholders lainnya. Pengimplementasian *Good Corporate Governance* yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen melaksanakan *Good Corporate Governance*.

Pengembangan *Good Corporate Governance* mengakodimir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta stakeholders lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu pada peraturan yang berlaku dan menerapkan kebijakan nilai - nilai etis yang dinyatakan eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang diperoleh selanjutnya dilakukan perhitungan rasio keuangan perbankan dengan 6 (enam)

analisis kinerja keuangan. Berikut ini adalah perhitungan analisis rasio kinerja keuangan tersebut:

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga (Wild & Subramanyam, 2007). Semakin rendah LDR Bank tersebut maka semakin likuid bank itu.

Tabel 1. Hasil Analisis Loan to Deposit Ratio (LDR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Tahun	LDR	Pertumbuhan	Keterangan
2002	81.10		
2003	101.08	19.98	Peningkatan
2004	94.64	-6.44	Penurunan
2005	85.34	-9.30	Penurunan
2006	80.55	-4.79	Penurunan
2007	79.55	-1.00	Penurunan
2008	90.41	10.86	Peningkatan
2009	104.42	14.01	Peningkatan
2010	93.33	-11.09	Penurunan
2011	82.78	-10.55	Penurunan
2012	80.90	-1.88	Penurunan
2013	88.36	7.46	Peningkatan
2014	97.40	9.04	Peningkatan
2015	97.32	-0.08	Penurunan
2016	102.75	5.43	Peningkatan
2017	92.57	-10.18	Penurunan
x1	88.54		
x2	95.68		

Sumber: Data Penelitian, 2018

Berdasarkan Tabel 1, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mengalami fluktuasi. *Loan to Deposit Ratio* tahun 2002 sampai dengan 2006 memiliki rata-rata sebesar 88,54%, sedangkan untuk tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 95,68%. Dinilai dari standar terbaik *Loan to Deposit Ratio* menurut Bank Indonesia yaitu <92%, walaupun terjadi peningkatan *Loan to Deposit Ratio* setelah penerapan *Good Corporate Governance* jumlah *Loan to Deposit Ratio* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang mencapai 95.68% ini menunjukkan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam keadaan likuid atau mampu membayar kewajibannya kepada para deposan melalui total kredit yang diberikan.

Return on Asset (ROA) merupakan rasio perbandingan antara laba keseluruhan sebelum pajak dengan total aktiva yang dimiliki oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dilihat dari jumlah asset yang dimiliki.

Tabel 2. Hasil Analisis Return on Asset (ROA) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Tahun	ROA	Pertumbuhan	Keterangan
2002	4.16		
2003	4.02	-0.14	Penurunan
2004	5.71	1.69	Peningkatan
2005	5.02	-0.69	Penurunan
2006	4.78	-0.24	Penurunan
2007	4.33	-0.45	Penurunan
2008	4.32	-0.01	Penurunan
2009	4.26	-0.06	Penurunan
2010	3.98	-0.28	Penurunan
2011	3.54	-0.44	Penurunan
2012	4.28	0.74	Peningkatan
2013	3.97	-0.31	Penurunan
2014	3.92	-0.05	Penurunan
2015	3.33	-0.59	Penurunan
2016	3.76	0.43	Peningkatan
2017	3.16	-0.60	Penurunan
x1	4.74		
x2	3.90		

Sumber: Data Penelitian, 2018

Dari Tabel 2, dapat diketahui *Return on Asset* berfluktuatif dan cenderung menurun, *Return on Asset* dari tahun 2002 sampai dengan 2006 memiliki rata-rata sebesar 4,74%. Sedangkan rata-rata selama 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 3,90%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset untuk mendapatkan laba tidak berjalan baik, dilihat dari rata-rata pada tahun setelah penerapan *Good Corporate Governance* bernilai 3,90% walaupun terjadi penurunan, nilai ini masih lebih besar dari batas nilai minimum untuk *Return on Asset* yaitu 2%. Penurunan nilai ini menunjukkan adanya penurunan profitabilitas perusahaan, khususnya dinilai dari penggunaan aset perusahaan.

Return on Equity adalah perbandingan antara laba bersih bank setelah pajak dengan modal sendiri. ROE mengindikasikan kemampuan modal inti untuk menghasilkan laba bagi perusahaan dalam bentuk prosentase.

Pada Tabel 3 perkembangan *Return on Equity* periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 memiliki rata-rata sebesar 26,53% dan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki rata-rata sebesar 29.96%. Dinilai dari standar terbaik *Return on Equity* menurut Bank Indonesia yaitu 12%, dilihat dari nilai *Return on Equity* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali setelah menerapkan *Good Corporate Governance* yang mencapai 29,96% Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mampu mengelola modalnya secara baik sehingga dapat menghasilkan laba bersih bagi bank tersebut.

Tabel 3. Hasil Analisis Return on Equity (ROE) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Tahun	ROE	Pertumbuhan	Keterangan
2002	32.43		
2003	25.90	-6.53	Penurunan
2004	25.65	-0.25	Penurunan
2005	25.02	-0.63	Penurunan
2006	23.66	-1.36	Penurunan
2007	24.17	0.51	Peningkatan
2008	25.13	0.96	Peningkatan
2009	26.74	1.61	Peningkatan
2010	28.09	1.35	Peningkatan
2011	29.55	1.46	Peningkatan
2012	36.95	7.40	Peningkatan
2013	31.19	-5.76	Penurunan
2014	25.66	-5.53	Penurunan
2015	24.93	-0.73	Penurunan
2016	24.31	-0.62	Penurunan
2017	19.85	-4.46	Penurunan
x1	26.53		
x2	29.96		

Sumber: Data Penelitian, 2018

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas bank dalam menekan biaya operasional sebagai usaha optimasi pendapatan operasional.

Tabel 4. Hasil Analisis BOPO PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Tahun	BOPO	Pertumbuhan	Keterangan
2002	81.41		
2003	76.72	-4.69	Penurunan
2004	66.53	-10.19	Penurunan
2005	67.31	0.78	Peningkatan
2006	67.54	0.23	Peningkatan
2007	71.03	3.49	Peningkatan
2008	72.46	1.43	Peningkatan
2009	66.72	-5.74	Penurunan
2010	68.96	2.24	Peningkatan
2011	69.74	0.78	Peningkatan
2012	62.82	-6.92	Penurunan
2013	63.03	0.21	Peningkatan
2014	64.89	1.86	Peningkatan
2015	69.67	4.78	Peningkatan
2016	66.51	-3.16	Penurunan
2017	71.01	4.50	Peningkatan
x1	71.90		
x2	67.89		

Sumber: Data Penelitian, 2018

Pada Tabel 4, nilai dari Beban Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2002 sampai dengan 2006 memiliki rata-rata 71,90% sedangkan untuk tahun 2013 sampai dengan 2017 memiliki rata-rata sebesar 67.89%. Nilai Beban Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO) cenderung mengalami penurunan, semakin kecil nilai rasio ini semakin efisien bank tersebut mengendalikan biaya operasional, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin tinggi.

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko, misalnya kredit yang diberikan.

Tabel 5. Hasil Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Tahun	CAR	Pertumbuhan	Keterangan
2002	15.76		
2003	17.94	2.18	Peningkatan
2004	19.83	1.89	Peningkatan
2005	21.52	1.69	Peningkatan
2006	21.03	-0.49	Penurunan
2007	18.70	-2.33	Penurunan
2008	15.18	-3.52	Penurunan
2009	13.75	-1.43	Penurunan
2010	12.79	-0.96	Penurunan
2011	11.73	-1.06	Penurunan
2012	16.79	5.06	Peningkatan
2013	18.71	1.92	Peningkatan
2014	20.71	2.00	Peningkatan
2015	24.44	3.73	Peningkatan
2016	20.42	-4.02	Penurunan
2017	18.90	-1.52	Penurunan
x1	19.22		
x2	17.47		

Sumber: Data Penelitian, 2018

Berdasarkan Tabel 5, bisa dilihat bahwa pada tahun 2002 sampai dengan 2006 Capital Adequacy Ratio memiliki rata-rata sebesar 19.22% dan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 memiliki rata-rata sebesar 17.47%. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia minimal sebesar 8%, semakin besar Capital Adequacy Ratio maka semakin aman dana yang diperoleh dari deposan yang bersangkutan dan menunjukkan bahwa bank tersebut semakin solvable.

Non-Performing Loans (NPL) merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan.

Berdasarkan Tabel 6, bisa dilihat bahwa pada tahun 2002 sampai dengan 2006 berfluktuatif dan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung mengalami penurunan. Non-Performing Loan pada tahun 2002 sampai dengan 2006 memiliki rata-rata sebesar 1,70% dan tahun 2013 sampai dengan 2017 memiliki rata-rata sebesar 1.07%. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia

menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah sebesar 5%, semakin kecil Non-Performing Loan Ratio maka semakin baik kualitas kreditnya.

Tabel 6. Hasil Analisis Non Performing Loans (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Tahun	NPL	Pertumbuhan	Keterangan
2002	0.85		
2003	2.17	1.32	Peningkatan
2004	1.82	-0.35	Penurunan
2005	2.15	0.33	Peningkatan
2006	1.50	-0.65	Penurunan
2007	1.58	0.08	Peningkatan
2008	0.76	-0.82	Penurunan
2009	0.68	-0.08	Penurunan
2010	0.57	-0.11	Penurunan
2011	0.57	0.00	Peningkatan
2012	0.45	-0.12	Penurunan
2013	0.33	-0.12	Penurunan
2014	0.34	0.01	Peningkatan
2015	1.96	1.62	Peningkatan
2016	1.47	-0.49	Penurunan
2017	3.10	1.63	Peningkatan
x1	1.70		
x2	1.07		

Sumber: Data Penelitian, 2018

Berdasarkan analisis *Return on Asset*, *BOPO*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loans* hasil perhitungan dan hasil komparasi rasio keuangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode lima tahun sebelum penerapan *Good Corporate Governance* yaitu tahun 2002 sampai dengan 2006 dan lima tahun terakhir setelah penerapan *Good Corporate Governance* yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2017 memiliki perbandingan dinilai dengan perhitungan rasio – rasio keuangan ditemukan.

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang mewakili likuiditas bank, hasil analisis diatas menunjukkan ada penurunan terhadap *Loan to Deposit Ratio* setelah penerapan *Good Corporate Governance* sebesar -8,06%.

Rasio Return on Equity, *BOPO* merupakan rasio yang mewakili penilaian terhadap rentabilitas bank. Hasil analisis diatas menunjukkan adanya perubahan dari kedua rasio tersebut setelah penerapan *Good Corporate Governance* masing-masing sebesar -1,62% dan 5,57%.

Capital Adequacy Ratio, *Non-Performing Loans* merupakan rasio yang mewakili penilaian solvabilitas bank, dari pengujian yang berhasil menunjukkan perubahan dari kedua ratio setelah penerapan *Good Corporate Governance* masing-masing sebesar 9,11% dan 36.77%. Dari hasil analisis penilaian solvabilitas mengalami peningkatan.

Return on Asset, dalam analisis ini mengalami peningkatan setelah penerapan *Good Corporate Governance* sebesar 17.78%.

Tabel 7. Hasil Analisis Komparatif Rasio Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Tahun	LDR	ROA	ROE	BOPO	CAR	NPL
2002	81.10	4.16	32.43	81.41	15.76	0.85
2003	101.08	4.02	25.90	76.72	17.94	2.17
2004	94.64	5.71	25.65	66.53	19.83	1.82
2005	85.34	5.02	25.02	67.31	21.52	2.15
2006	80.55	4.78	23.66	67.54	21.03	1.50
2007	79.55	4.33	24.17	71.03	18.70	1.58
2008	90.41	4.32	25.13	72.46	15.18	0.76
2009	104.42	4.26	26.74	66.72	13.75	0.68
2010	93.33	3.98	28.09	68.96	12.79	0.57
2011	82.78	3.54	29.55	69.74	11.73	0.57
2012	80.90	4.28	36.95	62.82	16.79	0.45
2013	88.36	3.97	31.19	63.03	18.71	0.33
2014	97.40	3.92	25.66	64.89	20.71	0.34
2015	97.32	3.33	24.93	69.67	24.44	1.96
2016	102.75	3.76	24.31	66.51	20.42	1.47
2017	92.57	3.16	19.85	71.01	18.90	3.10
x1	88.54	4.74	26.53	71.90	19.22	1.70
x2	95.68	3.90	26.96	67.89	17.47	1.07
Perubahan rata-rata	-8.06%	17.78%	-1.62%	5.57%	9.11%	36.77%

Sumber: Data Penelitian, 2018

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil menemukan adanya peningkatan kinerja keuangan setelah penerapan *Good Corporate Governance* jika dilihat menggunakan *Return on Asset*, *Beban Operasional/Pendapatan Operasional*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loans*. Sedangkan jika dilihat melalui rasio *Loan to Deposit* dan *Return on Equity* penelitian menemukan adanya penurunan kinerja setelah penerapan *Good Corporate Governance*. Terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan setelah penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari nilai signifikan lebih dari 5% yaitu *Return on Asset*, *Beban Operasional/Pendapatan Operasional*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loans*

Dengan adanya perbaikan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali setelah penerapan *Good Corporate Governance*, khususnya dalam aspek *Loan to Deposit Ratio*, *Return on Equity*, *Beban Operasional/Pendapatan Operasional*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loans* maka sudah seharusnya PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mempertahankan dan memperbaiki kinerjanya dengan cara menanamkan kesadaran terutama kepada manajemen bank, mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance*. Untuk meningkatkan rasio *Return on Asset*, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perlu meningkatkan porsi penyaluran kredit produktif serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan operasionalnya.

REFERENSI

Allen, F., & Elena, C. (2007). Bank, Markets, and Liquidity. *Journal of Banking and Finance*.

- Anggitarani, A. (2009). *Pengaruh Corporate Governance, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Bank BPD Bali. (2015). Retrieved from <https://www.bpd Bali.co.id/home.php?lang=en&act=menu&idm=227>
- Darmawati, D., Khomsiyah, & Rahayu, R. G. (2004). Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VII*.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Donnelly, J. H., Gibson, J. L., & Ivancevich, J. (1994). *Fundamental of Management*. Texas: Business Publication.
- Horne, V., James, C., & Wachowicz, J. M. (2005). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Jeaning, P., & Beaver, G. (1997). The Performance and Competitive Advantage of Small Firms: A Management Perspective. *International Small Business Journal*, 15(2), 63-75.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Krugman, P. (1998). What's New About The New Economic Geography ? *Oxford Review of Economic Policy*, 14(2), 7-17.
- Moeljadi, & Zamani, M. I. U. (2012). Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dengan Ratio Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, dan Capital Adequacy Ratio. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(1).
- Mulyadi. (2001). *Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riani, E. D. (2014). *Kinerja Koperasi Berdasarkan Kep.Men.No.129/Kep/M/ Kukmm / Xi / 2002, Hambatan, Permasalahan Dan Implementasinya (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Se-Kabupaten Pemalang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rosyid, A. (2015). Pengaruh Kinerja Sosial dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 72-85.
- Sam'ani. (2008). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007*. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Saragih, J. M. P. (2013). Analissi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Penyajian Laporan Keuangan pada PT Radio Volare. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN*, 2(3).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, M., & Zakaria, A. (2010). *Jejak Bisnis Rasul*. (G. Romadhona, Ed.). Jakarta : Hikmah.
- Triwinasis, C. R. (2013). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012)*. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Semarang.

Wibowo. (2004). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wild, Subramanyam, et al. (2007). *Financial Statement Analysis* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.